

***Management of Ecology-Based Tourism Resources in Tarabunga Village and Lumban Silintong, Toba Samosir Regency***

**Osland Herijon Lingga<sup>1)</sup>**

**Politeknik Pariwisata Medan**

***Email : [oslandlingga@poltekparmedan.ac.id](mailto:oslandlingga@poltekparmedan.ac.id)***

**ABSTRACT**

*The management of tourism resources illustrates an important element to be taken into account for conventional tourism development which tends to be exploitative and ignores the carrying capacity of the physical and social environment. Because the development of the tourism industry is obliged to maintain the quality of the environment, maintaining the noble heritage of local cultural traditions which is useful for increasing economic growth. If the manager of tourism resources is ignored and not managed properly, the process of destruction of nature and traditional values will occur more quickly and will have an impact on the sustainability of the tourism ecosystem in Tobasa district. What is the condition of the tourism resource managers in Tarabunga and Lumban Silintong Villages, Tobasa Regency, is the tourism resource management in Tarabunga and Lumban Silintong Villages, Tobasa Regency following the principles of sustainable tourism. The paradigm shift from production-centered development to people-centered development has implications for the emergence of new management, known as Local Resource Management (PSDL) or community based resource management. This new development management has changed the role of government bureaucracy to create conditions that give people the ability to develop themselves. This study analyzes ecology-based tourism resource management using descriptive methods by analyzing data qualitatively. This method is used to collect data and information about local situations and conditions based on accurate facts. The management of tourism resources in Tarabunga and Lumban Silintong Villages in Tobasa District has not been integral because it does not involve local communities. The local community as the host is placed in a position outside the management system. Less attention to sustainable principles in preserving the environment, nature and local culture which results in disharmony of nature. Institutional functions that do not yet exist also involve the surrounding community which is still very minimal and also some aspects that are still not good, such as accessibility and management of the physical environment which still tends to be neglected.*

***Keywords : management, resource, ecolog***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pengelolaan sumber daya pariwisata berperan penting dalam keberlanjutan dan kelestarian sumber daya. Pentingnya pengelolaan sumber daya pariwisata karena pengembangan

pariwisata konvensional cenderung eksploitatif dan mengabaikan daya dukung lingkungan fisik dan sosial (Richardson dan Fluker, 2004).

Beberapa studi menunjukkan bahwa telah terjadi eksploitasi sumberdaya alam di wilayah Danau

Toba. Bentuk eksploitasi tersebut berupa semakin banyak lahan subur dikorbankan untuk pembangunan hotel-hotel maupun fasilitas wisata lainnya. Selain itu eksploitasi Danau Toba juga dalam bentuk penyalahgunaan Danau Toba dimana Danau Toba dijadikan lahan perikanan.

Orientasi PSDL yang sangat dominan pada komunitas, menurut (Korten,1987) pada dasarnya dapat dijelaskan melalui tiga alasan.; (a) *Local Variety*, dimaksud agar pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan variasi yang ada pada setiap komunitas, (b) *Local resources*, masyarakat local dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Dalam hal ini, kewenangan harus lebih banyak diberikan pada masyarakat dengan membatasi campur tangan birokratis. (c) *Local accountability*, maksudnya adalah bahwa prinsip dasar dari masyarakat dapat terwujud bila pengelolaan dan pertanggung jawaban atas suatu tindakan diberikan pihak yang terutama akan menanggung akibat dari tindakan tersebut.

Namun, PSDL belum terimplementasi dengan baik. Pada dewasa ini perkembangan pariwisata di Sumatera Utara masih mengarah ke pariwisata masal. Kebijakannya masih berpihak pada jenis pariwisata yang mengomersilkan sumber daya alam dan budaya masyarakat dan dimiliki oleh kelompok modal besar atau perseorangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism)

Menurut Lim & MacAleer (2003) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sebagian memanfaatkan sumber daya alam sebagai produk utama, pengelolaan dan pengembangannya perlu didasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Masyarakat setempat yang bertempat tinggal di daerah tujuan wisata mempunyai peran yang amat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerahnya.

Dalam konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan, hal yang terpenting adalah dimana pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. Kebutuhan dasar sebagian besar penduduk di bumi ini seperti pangan, sandang, papan, pekerjaan perlu terpenuhi, disamping mempunyai cita-cita akan kehidupan yang lebih baik.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas bukan absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut (Djajadiningrat, 2001):

1. Menjamin pemerataan dan keadilan social
2. Menghargai keanekaragaman (diversity)
3. Menggunakan pendekatan integrative

#### 4. Meminta perspektif jangka panjang.

Di dalam pembangunan berkelanjutan terkandung dua gagasan penting, yaitu gagasan kebutuhan yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutan kehidupan manusia serta gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Sehingga untuk memenuhi dua gagasan tersebut diperlukan syarat-syarat untuk pembangunan berkelanjutan (Djajadiningrat, 2001), sebagai berikut:

1. Keberlanjutan Ekologis
2. Keberlanjutan Ekonomi
3. Keberlanjutan Sosial dan Budaya
4. Keberlanjutan Politik
5. Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan

Dalam kaitannya dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana agar supaya obyek daerah tujuan wisata dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

## **METODOLOGI**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menganalisa mengenai pengelolaan sumberdaya pariwisata berbasis ekologi dengan menggunakan metode deskriptif dengan teknik analisis data secara kualitatif. Metode deskriptif-kualitatif ini digunakan agar terkumpulkan data dan informasi tentang situasi dan kondisi setempat berdasarkan fakta yang akurat.

Penelitian deskriptif (Narbuko, 1997) merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi penelitian tersebut juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi. Sementara Supranto (1997) berpendapat bahwa penggunaan desain atau metode deskriptif-kualitatif adalah untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat, dengan tujuan untuk mencari gambaran yang sistematis disertai fakta yang akurat.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menguraikan apa yang terjadi dari permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian non statistik mengenai pengelolaan sumberdaya pariwisata di Desa Tarabunga dan Pantai Lumban Silintong dengan cara merekonstruksi kesan-kesan yang ada dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan bahan dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang daya pengelolaan sumberdaya pariwisata yang terjadi selama ini di Desa Tarabunga dan Pantai Lumban Silintong yang berbasis ekologi dengan merangkai fakta-fakta yang diperoleh sehingga mampu menunjukkan kebenarannya. Oleh karena itu, data yang berasal dari arsip maupun pengamatan secara langsung serta hasil dari wawancara yang digabung untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata di Desa Tarabunga dan Desa Lumban Silintong, Kabupaten Tobasa

#### Pengelolaan Produk Wisata

Pengelolaan produk wisata diperlukan agar pengembangannya terarah, agar kelestarian alam terjaga dan agar manfaat ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat lokal didapat. Dengan demikian, daya tarik wisata dapat berkembang dengan baik. Masyarakat pun mendukung dan berpartisipasi aktif di dalam pengembangan daya tarik yang tetap berlandaskan prinsip keseimbangan.

Elemen yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan produk wisata adalah ketersediaan atraksi wisata, amenities (fasilitas wisata), aksesibilitas (infrastruktur) dan *ancillaries* (kelembagaan). Semakin lengkap dan semakin baik kualitas produk wisata, semakin kuat posisi suatu wilayah menjadi destinasi wisata.

#### Pengelolaan Atraksi Wisata

Unsur utama yang menarik minat wisatawan berkunjung ke destinasi wisata adalah adanya atraksi wisata. Untuk merebut pasar wisatawan unsur daya tarik ini harus dikelola dengan optimal. Indikator pengelolaan atraksi adalah keunikan, keaslian, dan keragaman atraksi yang ditawarkan.

Ketersediaan atraksi wisata di Desa Tarabunga dan Desa Lumban Silintong lumayan beragam, terdiri dari atraksi wisata alam berupa Pantai Lumban Silintong yang masih merupakan kawasan danau Toba dan lokasi perbukitan di Tarabunga, atraksi

wisata budaya berupa desa yang merupan sentra tenun kain ulos di wilayah Tobasa.

Manajemen atraksi wisata di kawasan Toba Samosir khususnya di daerah Desa Tarabunga dan Lumban Silintong tidak terlalu baik. Walaupun Pemerintah berusaha mendiversifikasi atraksi wisata. Seperti misalnya diselenggarakannya Festival Danau Toba yang diselenggarakan setiap tahunnya dan pada tahun ini diselenggarakan pada bulan September yaitu pada tanggal 17-21 September 2014 yang mana event festival ini telah menjadi agenda nasional tahunan yang diselenggarakan langsung pihak Kemenparekraf yang di berkejasama dengan pemerintah daerah setempat. Walaupun demikian Festival ini mampu meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Toba Samosir khususnya wisatawan mancanegara sebesar dimana pada tahun 2010 sebanyak 191.466 orang, meningkat menjadi 259.299 pada tahun 2013.

Festival yang digelar setiap tahunnya ini menampilkan berbagai atraksi kesenian tradisional berupa Tari Tumba Batak Toba yang dibawa puluhan pelajar SD. Tarian tersebut menggunakan perlengkapan tradisional seperti tempurung kelapa, bambu, dan tampah. Pertunjukan dilanjutkan dengan tari tortor dan maminta gondang serta eksibisi permainan tradisional Batak Margala. Selain itu ada juga tarian Bhineka Tunggal Ika yang menggambarkan suku-suku di Sumut diantaranya. Selanjutnya dalam festival tersebut juga direntangkan ulos sepanjang 433 meter di sepanjang jalan dan juga yang menjadi pertandingan paling menarik adalah lomba solu bolon

yaitu lomba perahu batak. Ini merupakan bagian pelestarian budaya lokal, dan upaya peningkatan kunjungan wisatawan. Perlombaan-perlombaan serta berbagai kegiatan yang ada di festival danau Toba itu merupakan kegiatan kuno yang menjadi pemandangan menarik terutama bagi wisatawan mancanegara.

Atraksi wisata yang bervariasi dapat membuat wisatawan mempunyai banyak pilihan untuk menikmatinya dan memperoleh pengalaman wisata yang cukup lengkap. Mereka pun dapat memperpanjang lama tinggal berwisata. Namun hal ini belum dapat direalisasikan oleh pengelola di kawasan wisata Desa Tarabunga dan di Pantai Lumban Silintong. Para pengelola dan pemerintah setempat hanya berfokus pada kondisi yang sudah ada tanpa berusaha untuk membuat atraksi wisata yang ada lebih bervariasi dan lebih menarik.

Pendekatan pengelolaan atraksi wisata di Pantai Lumban Silintong maupun di desa Tarabunga hanya berorientasi bisnis dan kurang memperhatikan keseimbangan ekologi dan budaya lokal. Pengelolaan eksploitatif berakibat terjadinya penurunan kualitas atraksi wisata. Pada dasa warsa terakhir aktivitas wisatawan di Danau Toba khususnya di sekitar Pantai Lumban Silintong berdampak terjadinya gangguan kebersihan berupa tumpukan sampah. Padahal masyarakat menyakini bahwa danau adalah kawasan suci dan bersih yang harus dijaga. Banyaknya sampah di kawasan bersih menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebersihan pantai. Selain itu menunjukkan komitmen yang rendah dari aparat pemerintah yang

bertanggung jawab terhadap kelestarian Danau Toba dan sekitarnya. Aktivitas pariwisata yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan hidup akan menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata sekaligus menghancurkan kehidupan masa depan manusia (Sumarwoto, 1997).

Pengembangan atraksi di Pantai Lumban Silintong dan Desa Tarabunga perlu memperhatikan keseimbangan ekologi dan budaya lokal untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Dibutuhkan perencanaan dan penataan atraksi wisata yang baik dengan mengedepankan harmonisasi alam untuk kesejahteraan masyarakat.

### **Pengelolaan Fasilitas Wisata**

Ketersediaan fasilitas wisata yang memadai merupakan kekuatan yang menarik kunjungan wisatawan ke tempat wisata. Fasilitas wisata di desa Tarabunga dan Desa Lumban Silintong kurang memadai. Fasilitas wisata yang tersedia di Desa Tarabunga contohnya masih sangat minim, baik dari segi akomodasi maupun akses ke desa tersebut sedangkan fasilitas wisata yang tersedia di Desa Lumban Silintong khususnya di daerah Pantai Lumban Silintong sudah ada berupa akomodasi, restoran, kios cinderamata, tempat parkir, taman, fasilitas boat dan sampan tradisional, *camping ground*, toilet, mini market, dll. Ketersediaan fasilitas wisata yang berkualitas baik tentu saja sangat dibutuhkan untuk memperkuat posisi Desa Lumban Silintong maupun Desa Tarabunga sebagai daerah tujuan wisata yang layak diperhitungkan di Tobasa.

Ketersediaan fasilitas wisata cukup lengkap yang ada di Desa Lumban Silintong namun berkondisi

kurang baik. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi fasilitas wisata di Pantai lumban Silintong sebagai berikut (a) Terdapat banyak sampah di sekitar pantai (b) Toilet kurang bersih , dan (c) Tempat pembuangan sampah belum memadai. Kekurangan ini menjadi perhatian pengelola pantai agar selalu menjaga kualitas fasilitas wisata sebagai penunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke pantai Lumban Silintong.

Pembangunan fasilitas wisata di Desa Tarabunga maupun Lumban Silintong dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tobasa dengan menggandeng investor. Kebijakan pemerintah menggandeng investor bertujuan untuk percepatan pembangunan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat di Tobasa khususnya di Desa Tarabunga dan juga Lumban Silintong. Kekuatan modal para investor diyakini akan mampu membangun fasilitas wisata yang dibutuhkan wisatawan. Untuk tujuan tersebut investor diberikan berbagai kemudahan dalam pembangunan fasilitas wisata yang justru merugikan masyarakat.

Kebijakan pembangunan fasilitas wisata dilakukan dengan mengorbankan alam demi pemenuhan kepuasan bisnis. Misalnya, pembangunan akomodasi, vila , dan fasilitas wisata lainnya di bangun di kawasan hutan konservasi. Beberapa fasilitas wisata lainnya seperti restoran, warung-warung ikan bakar dibangun dengan melanggar sempadan danau. Pembangunan fasilitas wisata yang tidak memperhatikan keseimbangan alam dapat berakibat disharmoni alam berupa tanah labil, rawan longsor, pendangkalan danau dan pantai, dan

kualitas Danau Toba di Desa Lumban Silintong semakin menurun. Jika kondisi ini dibiarkan akan mengancam kehidupan masyarakat desa dan juga keberlanjutan pariwisata di wilayah ini.

Agar keberlanjutan pariwisata di Tobasa khususnya di Desa Tarabunga dan desa Lumban Silintong tetap terjaga, implementasi nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan keharmonisan dalam hidup perlu dilakukan secara konsekuen dan terarah. Konsep ini sangat selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

### **Pengelolaan Aksesibilitas**

Kebutuhan aksesibilitas yang baik merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindarkan. Semakin baik fasilitas akses yang dimiliki, dan semakin mudah mencapai objek wisata semakin menariklah tempat tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Indikator ketersediaan aksesibilitas berupa ketersediaan jaringan jalan, moda transportasi, waktu tempuh, kepadatan lalu lintas dan kelengkapan rambu-rambu penunjuk arah.

Kenyamanan adalah hal penting bagi wisatawan. Jika wisatawan tidak nyaman wisatawan akan beralih ke daerah wisata lainnya. Kondisi ini akan mengancam keberlanjutan pariwisata di kawasan Tobasa. Dibutuhkan perencanaan yang memperhitungkan daya dukung wilayah agar mampu mengatasi keadaan akses jalan raya bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan wisata di Lumban Silintong.

### **Pengelolaan Kelembagaan**

Desa Tarabunga maupun Desa Lumban Silintong belum ada lembaga khusus yang mengelola sumberdaya



pariwisata. Pengelolaan selama ini dilakukan secara parsial dan tidak ada koordinasi. Pada dewasa ini masyarakat di sekitar pantai Lumban Silintong menuntut pembagian retribusi yang lebih untuk pembiayaan kebersihan di sekitar pantai. Minimnya kontribusi yang ada kepada warga adat sudah lama dikeluhkan, seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga sebagai berikut.

Kami warga ada di sekitar lumban Silintong sudah sering kali meminta perhatian pengelola untuk ikut berkontribusi menjaga kelestarian pantai Danau Toba di sekitar Lumban Silintong. Dimana sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak pengelola. Tuntutan kami sebenarnya tidak berlebihan mengingat kawasan Pantai Lumban Silintong sudah banyak dikomersialkan. (Wawancara, 24 Oktober 2014).

Keluhan warga juga terkait perihal pengelolaan lahan parkir yang semrawut. Idealnya, warga setempat bisa diberdayakan dalam menangani lahan parkir bersama Pemkab Tobasa. Pengelolaan parkir semacam ini membuktikan kurangnya perhatian pengelola kepada warga sekitar atau *enclave* ekonomi terjadi di wilayah ini.

Pengelola pun beralih sudah memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan warga dengan memberikan sebagian retribusi kepada mereka namun menurut masyarakat sekitar hal tersebut belum cukup.

### **Pengelolaan Pemasaran**

Distribusi dan penyebaran informasi berbagai jenis kegiatan wisata di lingkungan objek wisata di Kabupaten Tobasa belum dilakukan dengan

maksimal. Upaya peningkatan kunjungan wisatawan maupun promosi agar efektif dan efisien dilakukan dengan upaya pengembangan kualitas atraksi wisata yang ada. Upaya yang dilakukan adalah sbb. (1) menempatkan kualitas produk wisata sebagai kunci pemasaran, yang memberikan gambaran publikasi terkait kondisi objek wisata. (2) Pembuatan brosur pariwisata. (3) Penggunaan media internet berupa website yang menampilkan produk wisata. (4) Penggunaan media massa lokal berupa artikel yang memuat informasi detail mengenai potensi dan kondisi objek bukit Tarabunga dan Pantai Lumban Silintong. (5) Penyelenggaraan festival budaya, selama dua minggu, selama liburan anak sekolah setiap Juli sampai Agustus. Langkah ini merupakan upaya pemasaran tidak langsung dan memberikan dampak positif munculnya minat dan rasa ingin tahu wisatawan.

Kegiatan promosi wisata tersebut berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Tobasa sebesar 8,5 persen pada tahun 2009-2011. Pada tahun 2011-2013 peningkatan kunjungan wisatawan ditargetkan sebesar 15%). Penetapan target peningkatan kunjungan wisatawan sebesar 15 persen ini perlu di pertanyakan mengingat kondisi Danau Toba semakin memprihatinkan. Pengelola diharapkan melakukan kajian mengenai daya dukung wilayah agar kerusakan lingkungan yang terjadi tidak bertambah parah.

### **Pengelolaan Lingkungan Fisik, Ekonomi, dan Sosial Budaya Pengelolaan Lingkungan Fisik**

Pengelolaan sumber daya pariwisata di Desa Tarabunga dan Desa

Lumban Silintong belum mampu menjaga lingkungan hidup tetap harmonis. Kegiatan pariwisata di Pantai Lumban Silintong berdampak pada lingkungan fisik. Tercatat sebagai besar masyarakat Desa Tarabunga dan juga masyarakat di Desa Lumban Silintong berpendapat bahwa kegiatan pariwisata berdampak bagi lingkungan fisik. Dampak lingkungan fisik terlihat nyata adalah pergeseran tatanan ekologis, berupa pencemaran dan pendangkalan danau yang disebabkan oleh aktivitas pariwisata dan aktivitas pertanian. Aktivitas ini berakibat penurunan kualitas air danau, dan gangguan kebersihan berupa tumpukan sampah di sekitar pantai.

Keberadaan sampah di sekitar pantai Lumban Silintong tersebut dapat merusak ekosistem danau. Sampah plastik tidak dapat dihancurkan oleh sistem alam dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang parah dan mengancam fungsi-fungsi lingkungan hidup lainnya. Menurut Picard (2006) pencemaran lingkungan menjadi ancaman besar bagi masa manusia. Gangguan kebersihan dapat menyebabkan dampak terhadap perkembangan pariwisata akibat kesan negatif wisatawan terhadap pemandangan danau yang dikotori oleh sampah.

Pencemaran lingkungan hidup merupakan sebuah ironi bagi Pantai lumban Silintong dan Desa Tarabunga sebagai destinasi pariwisata. Kawasan yang seharusnya menampilkan citra Toba Samosir yang bersih ,aman, lestari, dan indah ternyata memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan. Kerusakan alam di Tobasa diakibatkan

kegagalan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah mengabaikan nilai-nilai lokal masyarakat dan keberpihakan pemerintah kepada sumber daya alam. Pentingnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal melalui penghargaan terhadap peran masyarakat lokal dalam mengelola alam dan budaya untuk mengendalikan kerusakan alam. Pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal dapat meningkatkan apresiasi masyarakat untuk terlibat dalam program pengendalian pencemaran. Oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mengimplementasikan landasan filosofi pembangunan pariwisata secara konsisten dan terarah.

### **Pengelolaan Aspek Ekonomi**

Tujuan pengelolaan sumber daya pariwisata dari aspek ekonomi adalah agar mampu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Dalam kenyataan terlihat bahwa dampak ekonomi multiganda dari sektor pariwisata mampu diciptakan dari pertumbuhan dan perkembangan kepariwisataan di Tobasa. Namun, kontribusi positif dari aspek ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Tobasa khususnya masyarakat desa Tarabungan dan Desa Lumban Silintong.

Peluang usaha yang ditimbulkan dari keberadaan objek wisata di kawasan Toba Samosir adalah usaha hotel, restoran, agrowisata, dll. Usaha-usaha ini memerlukan modal besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat dan membutuhkan profesional tinggi. Usaha-usaha ini lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta dan bukan oleh masyarakat yang ada di Tarabunga dan



Lumban Silintong ataupun masyarakat Tobasa pada umumnya. Sebagian besar hasil usaha-usaha ini tidak terdistribusi di tingkat lokal melainkan mengalir keluar desa. Usaha-usaha tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan juga pendatang dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Lapangan pekerjaan dalam bidang ini cukup luas. Namun, karena banyaknya tenaga kerja yang bersaing menyebabkan posisi tawar pekerja lokal menjadi lemah sehingga upah atau gaji yang mereka terima di bawah upah minimal yang ditetapkan pemerintah. Pada tahun 2013 Upah Minimum Kabupaten Tobasa sebesar Rp1.505.850 per bulan. Pekerja lokal yang menempati posisi manajer minim. Jika pendapatan yang diperoleh investor dan staf manajemen dibandingkan dengan pegawai *frontliner* yang jumlahnya mayoritas, ketimpangannya sangat besar.

Ketidakmampuan masyarakat Tobasa memanfaatkan peluang usaha karena ketidakmampuannya memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Kekuasaan untuk merebut peluang kerja yang tersedia lebih banyak dimiliki oleh para pendatang. Mereka lebih siap dan mampu memenuhi persyaratan kerja yang dibutuhkan. Jika ketimpangan ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi antara masyarakat Tobasa dengan masyarakat pendatang. Ketidakadilan ekonomi berpotensi terjadi konflik. Oleh karena itu, penataan ulang dengan peraturan yang ketat dan memberi ruang gerak bagi timbulnya ekonomi kerakyatan sangat diperlukan. Jika tidak, kenyamanan Tobasa akan dipertaruhkan.

Pariwisata akan dapat menghancurkan kepariwisataan itu sendiri.

### **Pengelolaan Sosial Budaya**

Dari aspek sosial budaya, kemajuan pariwisata menyebabkan pergeseran nilai-nilai lokal. Ukuran sosial dan norma masyarakat tradisional mulai menghilang menjadi ukuran yang modern. Akibatnya nilai-nilai kebudayaan mengalami pergeseran. Tergerusnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong yang semula berlandaskan kebersamaan dan ketulusan kini bergeser berlandaskan uang.

Secara umum karakteristik sosial budaya kehidupan masyarakat Tobasa berada dalam tahap transisi. Di satu sisi, masyarakat masih berteguh tradisi kehidupan tradisional, di sisi lain sudah berpola kehidupan modern, seperti terlihat dalam hal-hal berikut (a) Sistem ekonomi mulai mengarah pada produksi untuk pasaran sehingga peranan uang semakin besar. (b) Gotong-royong secara tradisional terbatas pada kalangan keluarga dekat dan tetangga karena hubungan kerja atas dasar pemberian upah sudah mulai berkembang. (c) Adat-istiadat masih dihormati, tetapi sikap terbuka terhadap pengaruh-pengaruh dari luar mulai berkembang.

### **Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Ketersediaan SDM dalam bidang kepariwisataan di Desa Tarabunga dan Lumban Silintong kurang memadai. Kualitas sumber daya di wilayah ini tergolong rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Desa

Tarabunga dan Desa Lumban Silintong. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dikuatkan dapat mengurangi daya tarik objek wisata mengingat unsur pelayanan penting dalam kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Masyarakat Tobasa pada umumnya belum mampu mengelola potensi wilayahnya dengan kemampuan yang mereka miliki sendiri. Intervensi langsung dari masyarakat luar terlihat menonjol di wilayah ini. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah. (1) Meningkatkan peran serta masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pariwisata. (2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal bahwa pada dasarnya jika mereka diberi kesempatan dan dibekali oleh pengetahuan sederhana akan mampu menjalankan program seperti masyarakat di luar desa lainnya. (3) Menimbulkan sikap profesional di kalangan masyarakat sehingga dapat menambah daya tarik maupun usaha-usaha yang menunjang kegiatan kepariwisataan.

### **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Pariwisata**

Pengelolaan sumber daya pariwisata memerlukan kemitraan yang solid antara tiga unsur utama yaitu pemerintah, swasta termasuk perguruan tinggi dan masyarakat lokal. Pelaksanaan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip adil, terbuka, dan transparan. Bentuk kemitraan yang dilakukan adalah dalam hal investasi, maupun dalam hal pembiayaan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas publik.

Kemitraan yang solid dalam pengelolaan sumber daya pariwisata membutuhkan koordinasi dan integrasi kebijakan yang intensif untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan wisata di desa-desa yang memiliki atraksi wisata dalam rangka kontribusi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat harus dibangun secara efektif dan saling komplementer.

Dalam penelitian ini strategi yang diusulkan dalam pengelolaan sumber daya pariwisata agar berkelanjutan dan berbasis ekologi adalah model *public private partnership (PPP)*. PPP merupakan kerangka baru bagi kerja sama antara *private and public sector* dan *community* seperti pergeseran dari intervensi pemerintah menjadi katalisator, mengembangkan partisipasi sektor swasta untuk menjamin keberlanjutan investasi, promosi, dan pemasaran, memperkuat peran pemerintah dalam membuat kebijakan dengan tujuan untuk memaksimalkan kontribusi pariwisata bagi masyarakat lokal.

Strategi ini mengedepankan hal-hal sebagai berikut. (a) Pembentukan organisasi yang otonom dan mandiri oleh masyarakat lokal. (b) Otoritas tertinggi dipegang oleh badan pengelola yang keanggotaannya melibatkan berbagai komponen yang ada di masyarakat. (c) Pelaksanaan pengelolaan objek wisata dilaksanakan melalui kolaborasi antar unsur dalam struktur *stakeholders*, yaitu meliputi pemerintah, institusi/badan non-pemerintah, perguruan tinggi/tenaga ahli, dan masyarakat. Sistem kolaborasi dan koordinasi pengelolaan tersebut

menunjukkan bahwa *stakeholders* pengelola mengedepankan aspek pembangunan masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Dalam praktiknya, strategi pengelolaan sumber daya agar mampu mendorong partisipasi masyarakat adalah melalui pembuatan program-program yang dapat dikerjakan oleh masyarakat lokal seperti: (1) pembentukan organisasi kelembagaan, (2) program penataan atraksi wisata, (3) program penataan fasilitas wisata, (4) program pemasaran, (5) program pelestarian lingkungan, (6) penguatan kapasitas masyarakat.

Dalam pelaksanaannya dapat dilibatkan beberapa komponen pelaku utama berikut ini. (a) Lembaga adat atau desa dinas yang intinya merupakan masyarakat lokal secara langsung akan berperan sebagai pengelola tingkat lokal. Keterlibatan ini bisa diwadahi juga dalam bentuk lembaga desa atau membentuk suatu kelompok swadaya. (b) Pihak pemerintah yang memberikan pembinaan dan arahan secara umum. (c) Pihak swasta dan pihak-pihak yang tertarik dengan pengembangan kepariwisataan atau pihak-pihak yang terjun dalam bisnis kepariwisataan dan perguruan tinggi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Pengelolaan sumberdaya pariwisata di Desa Tarabunga dan Lumban Silintong di Kabupaten Tobasa belum integral karena kurang melibatkan masyarakat lokal. Masyarakat lokal sebagai tuan rumah justru ditempatkan pada posisi di luar sistem manajemen. Pengelolaan seperti

itu jelas bertentangan dengan paradigma pembangunan berbasis masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen pemerintah untuk memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya lokal yang dimiliki.

2. Pengelolaan sumberdaya pariwisata kurang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan, alam dan budaya lokal yang berakibat terjadinya disharmonisasi alam. Agar keberlanjutan pariwisata di Desa Tarabunga dan Lumban Silintong tetap terjaga implementasi nilai-nilai masyarakat yang mengedepankan keharmonisan dalam hidup perlu dilakukan secara konsekuen dan terarah. Konsep ini sangat selaras dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

3. Fungsi kelembagaan yang belum ada baik di Desa Tarabunga maupun Desa Lumban Silintong dan juga keterlibatan masyarakat sekitar yang masih sangat minim dan juga beberapa aspek yang masih belum baik, seperti aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan fisik yang masih cenderung terabaikan.

### **Saran**

1. Model pengelolaan sumberdaya pariwisata berbentuk kemitraan yang solid antara tiga unsur utama yaitu pemerintah, swasta termasuk perguruan tinggi dan masyarakat lokal diharapkan mampu mengedepankan aspek pembangunan masyarakat lokal khususnya di bidang ekonomi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Perlunya dukungan dan ide-ide yang baik guna dalam pengelolaan

lingkungan di area wisata dan perbukitan di Desa Tarabunga dan Lumban Silintong. Warga yang ada disekitar turut berpartisipasi dalam tahapan perencanaan dan dalam pelaksanaan di dorong peran organisasi bidang pariwisata dalam pengendalian bersifat partisipatif.

3. Fungsi Kelembagaan seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga pemanfaatan masyarakat lokalpun dapat dimaksimalkan dan diharapkan agar pemerintah setempat dapat membenahi aksesibilitas menuju daerah objek wisata dan juga tetap melestarikan lingkungan fisik alam sekitar demi keberlangsungan sumber daya itu sendiri bagi generasi yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia (2009): Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Jakarta.
- Djajaningrat (2001). *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fandeli, C. Dan Nurdin, M. (2005). *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi di Taman Nasional*.: Fakultas Kehutanan UGM dan Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta
- Giddings, Bob, Bill Hopwood, Geoff O'Brien (2002), 'Environment, Economy, and Society: Fitting Them Together Into Sustainable Development', Sustainable Development, 10 : 187-196.
- Hadi, Sudharto P .(2005), *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Korten, D.C. (1984). *Pembangunan yang Memihak Rakyat*.: Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta
- Korten, D.C. (1987). *Community Management, Asian Experience and Perspective*.: Kumarian Press. USA
- Lim & Macleer. (2003). *Economics and Ecology: New Frontiers and Sustainable Development*. Chapman & Hall, London.
- Lindsay et al. (2008). *Tourism and Sustainable Community Development*, Routledge, London
- Munasinghe, Mohan .(1993), *Environmental Economics and Sustainable Development*, The World Bank, Washington DC.
- Picard, M., (2006), *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*, Penerjemah Jean Couteau dan Warih Wiratsana, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, Forum Jakarta-Paris.
- Purnamasari. (2005). *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata di Desa Muluk Kabupaten Bantul*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Richardson, J.I and Fluker, M. (2004), *Understanding and Managing Tourism*, Australia: pearson Education Australia.
- Sianturi, Tumiar. (2005). Degradasi Danau Toba. *Jurnal Penelitian Ilmu Pertanian Volume 2, Nomor 1, April 2005*.
- Soemarwoto, O., (1997), *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.: Gajahmada University Press, Yogyakarta

Soemarwoto, Otto .(2009), *Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.